

TESIS

**PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA
MELEBIHI BATAS KEWAJARAN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (S2) di Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN DI KOTA PADANG

**Muhammad Arie Pati Azmar, 2020123029, Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2024**

ABSTRAK

Profesi notaris adalah posisi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menawarkan jasa yang terkait dengan formalisasi perjanjian tentang hak dan tanggung jawab individu yang meminta bantuan mereka. Tanggung jawab utama Majelis Kehormatan adalah mengawasi penegakan kode etik Notaris. Hal ini dilakukan untuk menegakkan integritas profesi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selain itu, Majelis Kehormatan bertujuan untuk melindungi kepentingan notaris dengan memastikan kepatuhan terhadap kode etik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas. Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2017, yang menetapkan pembatasan jumlah akta yang dapat dibuat oleh notaris dalam satu hari. Berdasarkan peraturan ini, notaris diperbolehkan untuk membuat maksimal 20 akta setiap harinya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang menyebabkan notaris di Kota Padang melebihi batas kewajaran dalam membuat akta. 2. Bagaimana proses pengawasan terhadap notaris di Kota Padang yang membuat akta melebihi batas kewajaran? 3. Apakah akibat hukum bagi notaris yang membuat akta yang melampaui batas kewajaran di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan data hukum melalui dua pendekatan yang berbeda: data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Faktor-faktor yang menyebabkan notaris melampaui batas kewajaran di Kota Padang antara lain: notaris melampaui batas kewajaran ketika membuat akta dalam jumlah besar, yang mungkin bertentangan dengan akta fidusia; kemungkinan melampaui batas kewajaran ketika membuat akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam satu hari, dengan potensi lebih dari 20 akta. 2. Pengawasan preventif dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.3. Notaris yang melampaui batas kewajaran dapat dikenakan sanksi hukum berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Akta melebihi batas Kewajaran

***VIOLATION OF THE NOTARY'S CODE OF ETHICS IN MAKING DEEDS
EXCEEDS REASONABLE
LIMITS IN PADANG CITY(Muhammad Arie Pati Azmar, 2020123029, Master of
Notary, Andalas University, 2024)***

ABSTRACT

The profession of a notary is a government-established position that caters to the community's requirements, particularly in offering services linked to the formalisation of agreements about the rights and responsibilities of the individuals who seek their assistance. The primary responsibility of the Honorary Council is to oversee the enforcement of the Notary code of ethics. This is done to uphold the integrity of the profession and provide legal protection to the community. Additionally, the Honorary Council aims to safeguard the interests of notaries by ensuring adherence to the code of ethics as stipulated by the Notary Position Law, which grants authority to the Supervisory Council. The Central Honorary Council of the Notary Association has issued Regulation Number 1 of 2017, which sets restrictions on the number of deeds that notaries can create in a day. According to this regulation, notaries are allowed to make a maximum of 20 deeds each day. This research aims to identify the elements that contribute to notaries in Padang City exceeding the reasonable limit while making deeds. 2. What is the oversight process for notaries in Padang City who create deeds that beyond the acceptable limit? 3. What are the legal ramifications for notaries who create deeds that beyond the fairness threshold in Padang City? This study employed empirical juridical research methodologies, which involved the collection of legal data via two distinct approaches: primary data gained through field research and secondary data obtained through library research. The determinants of notaries exceeding the fairness limit in Padang City Factors leading to notaries exceeding the fairness limit in Padang City include: notaries exceeding reasonable limits when making deeds in bulk, which may contradict the fiduciary deed; the possibility of exceeding the reasonable limit when making Home Ownership Credit (KPR) deeds in a single day, with a potential of more than 20 deeds. 2. Notaries who exceed the reasonable limit of supervision are subject to both preventative and repressive monitoring. preventative supervision occurs before the implementation of work or activities, while repressive supervision occurs after the work or activities have been carried out.3. Notaries who exceed the fair limit of written warnings may face legal sanctions such as temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonourable dismissal.

Keywords: Violations, Code of Ethics, Deeds exceeding reasonable limits